

ABSTRAK

Intan Kuraeni, Manajemen Evaluasi Ketepatan Alokasi Nilai Manfaat Dana Abadi Umat dalam Program Kemaslahatan BPKH.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengelola nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) melalui Program Kemaslahatan untuk mendukung kesejahteraan umat Islam di Indonesia. Hingga akhir tahun 2024, dana kelolaan BPKH tercatat sebesar Rp171,65 triliun, tumbuh 52,78 persen sejak Desember 2018, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap ketepatan penyaluran nilai manfaat DAU tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana BPKH menganalisis kebutuhan umat dan menyiapkan kapasitas kelembagaan, menganalisis kebutuhan proses implementasi dan monitoring penyaluran dana, serta menganalisis dampak dan keberlanjutan program kemaslahatan terhadap kesejahteraan umat Islam.

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretative dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1992), dengan keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik serta *member check*. Kerangka teori yang digunakan menggabungkan model evaluasi *Context, Input, Process, Product* (CIPP) dari Stufflebeam dengan sembilan prinsip *good Governance* dari UNDP (1997) yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, kepastian hukum, kesetaraan, daya tanggap, orientasi konsensus, dan visi strategis yang diintegrasikan pada setiap tahap evaluasi CIPP untuk menilai kualitas tata kelola pengelolaan DAU.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi *context* dan *input* mengungkapkan tahap perencanaan telah berpijak pada kerangka regulasi berlapis dan mekanisme verifikasi berjenjang, meski transparansi, partisipasi penerima manfaat, dan kesetaraan distribusi kuota wilayah masih memerlukan penguatan. Evaluasi *process* menunjukkan akuntabilitas formal berjalan konsisten, ditandai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh tahun berturut-turut, namun pengawasan substantif di lapangan masih dibatasi rasio personel Monitoring dan Evaluasi terhadap volume program. Evaluasi *product* memperlihatkan komitmen awal yang kuat pada akuntabilitas dan visi strategis melalui penyusunan *Sustainability Report* dan instrumen *Social Return on Investment* (SROI), meskipun pengukuran dampak belum merata di seluruh program. Secara keseluruhan, Program Kemaslahatan BPKH telah menunjukkan fondasi tata kelola yang cukup memadai, sejalan dengan konsep *good enough governance* (Grindle, 2010), namun ketepatan alokasi nilai manfaat DAU kepada sasaran yang tepat masih memerlukan penguatan bertahap.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Dana Abadi Umat, CIPP, *Good Governance*, BPKH